

ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN *POLICY BRIEF*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

SKRIPSI



Oleh :

WIDYANTO DWI JATMIKO
NPM. 22071010131

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN *POLICY BRIEF*

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

SKRIPSI



Oleh :

WIDYANTO DWI JATMIKO
NPM. 22071010131

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN *POLICY BRIEF*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026

Penyusun,



Widyanto Dwi Jatmiko
NPM. 22071010131

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN *POLICY BRIEF*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA

Penyusun

Widyanto Dwi Jatmiko

22071010131

Skrripsi telah diuji oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026

Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:
Ketua,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN *POLICY BRIEF*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA**

Penyusun,

Widyanto Dwi Jatmiko
22071010131

Skrripsi telah diuji oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026

Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:
Ketua,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II,

Abdullah Fikri, S.H.L., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widyanto Dwi Jatmiko
NPM : 22071010131
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidakterdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademikdi suatulembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernahditulisatauditerbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalamdokumenini dandisebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabiladikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerimasanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga danuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Februari 2026

Yang Membuat pernyataan



Widyanto Dwi Jatmiko
NPM. 22071010131

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Urgensi Kebutuhan *Policy Brief* Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu.

Penulis mengangkat judul “Analisis Urgensi Kebutuhan *Policy Brief* Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Di Indonesia” dalam skripsi ini. Penyusunan dimaksudkan sebagai pengajuan untuk melakukan penelitian hukum sebagai salah satu syarat kelayakan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) . Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis, dan berharap dijadikan pertimbangan ilmiah untuk diterapkannya *policy brief* sebagai bagian wajib yang dibuat dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan bupati di Indonesia.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku pembimbing yang telah membantu memberikan ilmu dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi.
6. Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Mohammad Rum Pramudya, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Ibu Vikriatuz Zahro, S.H. selaku mentor penulis.
8. Keluarga, Ayah Satriyo Utomo, S.Sos., M.Si. , Ibu Nur Hidayatin, S.AP. , Mas Falih Wicaksono, Adik Kirana Puspasari, dan Adik Aqila Zata Rahmasari yang sudah memberikan dukungan luarbiasa baik secara material ataupun immaterial.
9. Adelia Aura Pramesty, Akasah Kanzul Arsy, Nadia Asyroful Aulia, Anastasia Anetha Putri, Nur Robi’ahtul Adawiyah Imani, Moch. Rafli Wahyu, Aurelia Novianti, Arif Fatur Rochman, Aprita Dara, dan Rafidan Difan selaku *support systems* penulis.
10. Kelompok 97 KKN SDGs Bela Negara Balas Klumprik.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Surabaya, Februari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Widyanto Dwi Jatmiko
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 01 Mei 2004
NPM : 22071010131
Bidang Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Puri Safira Regency C4 NO. 04, Kec. Menganti, Kab. Gresik,
Jawa Timur

ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN POLICY BRIEF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA ABSTRAK

ABSTRAK

Naskah akademik bukan hanya syarat formal, tetapi juga menjadi acuan kebijakan. Namun, tidak semua produk hukum di Indonesia diwajibkan menggunakan naskah akademik. peraturan bupati sebagai salah satu peraturan kepala daerah tidak memiliki kewajiban tersebut. Peraturan bupati yang dapat diterbitkan tanpa kajian akademis, menjadikan peraturan bupati rentan tumpang tindih dengan regulasi lain dan berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan membuka ruang bagi lahirnya regulasi yang lemah dari sisi akademis.

Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap bahwa *policy brief* memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem pembentukan peraturan bupati di Indonesia karena mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah, proses pengambilan keputusan hukum dan menjadi media efektif untuk mentransformasikan hasil kajian empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif. Melalui pendekatan berbasis bukti, *policy brief* memperkuat rasionalitas setiap keputusan hukum di tingkat daerah. *Policy brief* menjamin agar produk hukum kepala daerah tetap berakar pada pertimbangan ilmiah yang objektif.

Perbandingan antara *policy brief* dan naskah akademik menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Naskah akademik berperan memberikan legitimasi hukum dan struktur argumentatif yang lengkap, sedangkan *policy brief* memberikan dimensi praktis dalam penerjemahan data menjadi kebijakan konkret. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas substansi dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Kata Kunci: *Policy Brief*, Naskah Akademik, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan.....	16
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
1.6.7 Jadwal Penelitian	21
1.7 Tinjauan Pustaka.....	23
1.7.1 Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan	23
1.7.2 Tinjauan Umum Konstruksi Hukum	31

1.7.3 Tinjauan Umum UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	32
1.7.4 Tinjauan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	34
1.7.5 Tinjauan Umum Naskah Akademik	35
1.7.6 Tinjauan Umum <i>Policy Brief</i>	37
BAB II URGENSI KEBUTUHAN <i>POLICY BRIEF</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA.....	39
2.1 Konsep Dasar <i>Policy Brief</i> Dan Urgensi Keberadaannya Sebagai Kebijakan..	39
2.2 Perbandingan <i>Policy Brief</i> dengan Naskah Akademik dalam Produk Daerah..	69
BAB III FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DENGAN <i>POLICY BRIEF</i> DALAM PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	79
3.1 Kelemahan Mekanisme Pembentukan Peraturan Bupati dan <i>Policy Brief</i>	79
3.2 Implikasi Hukum Integrasi <i>Policy Brief</i> dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	96
BAB IV PENUTUP	111
4.1 Kesimpulan	111
4.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	120

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BAPEMPERDA	: Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENDAGRI	: Kementrian Dalam Negeri
KEPPRES	: Keputusan Presiden
HAM	: Hak Asasi Manusia
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PDLT	: Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tanggungjawab
Perppu	: Peraturan Perundang-undangan
Perpres	: Peraturan Presiden
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PROPEMPERDA	: Program Pembentukan Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Lampau Dan Penelitian Penulis....	12
Tabel 2. Waktu Penelitian	21
Tabel 3. Perbandingan Naskah Akademik dan <i>Policy Brief</i> pada beberapa aspek .	71
Tabel 4. Perbandingan <i>policy brief</i> versi jurnal Felt, E., Carrasco, J. M., & Vives-Cases, y dan versi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Penyusunan <i>Policy Brief</i> versi jurnal Felt, E., Carrasco, J. M., & Vives-Cases	90
Bagian 2. Alur penyusunan <i>Policy Brief</i> versi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	91
Bagan 3. Alur Penyusunan <i>Policy Brief</i> hasil analisis penulis	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Profeiciency Test</i>	118
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	119
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	120
Lampiran 4. Kartu Bimbingan	121
Lampiran 5. Halaman Persetujuan Skripsi	122
Lampiran 6. Form Ajuan Judul	123
Lampiran 7. Bukti Bayar UKT	124
Lampiran 8. Kartu Rencana Studi.....	125
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan PKL	126
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	127
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	128
Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	129
Lampiran 13. Sertifikat <i>Library Class</i>	130
Lampiran 14. <i>Letter of Acception</i> Jurnal Sinta 4	131
Lampiran 15. Bukti Daftar Ujian Lisan.....	132
Lampiran 16. <i>Link</i> Referensi.....	133
Lampiran 17. Lembar Revisi	153